

Article

Perspektif Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara mengenai Efektivitas Demonstrasi

Zaki Anandya Putra¹, Andhrea Haning Saputry², Mifta Khoirul Putri Rahayu³, Kiki Imas Septiyani⁴, Ichsan Shodiqin⁵, Joko Tri Nugraha⁶

¹²³⁴⁵⁶Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

* *Correspondensi Penulis:* zaki.anandya.putra@students.untidar.ac.id

Abstract: *This research aims to identify the perceptions of Public Administration students regarding the effectiveness of demonstrations and to explore more relevant alternative forms of public participation. Using a descriptive quantitative approach, the research employed an online survey with 75 respondents, whose data were analyzed through frequency distributions, mean values, standard deviations, and thematic qualitative analysis of open-ended responses. The results indicate that while many students still view demonstrations as an effective way to convey aspirations, a significant number prefer social media as a strategic mobilization tool. Social media is considered capable of reaching a broader audience with lower risk compared to physical demonstrations. Additionally, alternatives such as online petitions and formal audiences have emerged as relevant and strategic options. Respondents believe that digital participation is more inclusive and accessible, enabling greater involvement in the advocacy process. Nonetheless, demonstrations retain an important symbolic role as a visible form of public pressure on policymakers. In conclusion, students are beginning to shift their political participation paradigm from traditional methods like demonstrations toward more modern, safe, and efficient strategies based on digital technology. This shift reflects an adaptation to evolving social and technological dynamics, whereby students leverage both field actions and the vast potential of digital spaces to convey aspirations and influence public policy effectively.*

Keywords: *Demonstration, Students, Public Participation, Social Media*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persepsi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terhadap efektivitas aksi demonstrasi serta mengeksplorasi bentuk partisipasi publik alternatif yang lebih relevan. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan survei daring yang melibatkan 75 responden, dianalisis melalui distribusi frekuensi, nilai rata-rata, simpangan baku, dan analisis kualitatif tematik untuk jawaban terbuka. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih menganggap demonstrasi efektif dalam menyampaikan aspirasi, namun banyak pula yang lebih memilih media sosial sebagai alat mobilisasi strategis. Media sosial dinilai mampu menjangkau khalayak lebih luas dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan demonstrasi fisik. Selain itu, alternatif lain seperti petisi daring dan audiensi formal muncul sebagai pilihan yang relevan dan strategis. Responden menganggap partisipasi berbasis digital lebih inklusif dan mudah diakses, sehingga dapat melibatkan lebih banyak pihak dalam proses advokasi. Meskipun demikian, demonstrasi tetap memiliki tempat penting sebagai simbol perjuangan dan bentuk tekanan publik yang langsung terlihat oleh pembuat kebijakan. Kesimpulannya, mahasiswa mulai menunjukkan pergeseran paradigma dalam partisipasi politik, dari metode tradisional seperti demonstrasi menuju strategi yang lebih modern, aman, dan efisien berbasis teknologi digital. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang, di mana mahasiswa tidak hanya mengandalkan aksi lapangan tetapi juga memanfaatkan potensi besar dari ruang digital untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan publik secara efektif.

Kata Kunci: Demonstrasi, Mahasiswa, Partisipasi Publik, Media Sosial

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Lambi,

PENDAHULUAN

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik non-elektoral yang berperan penting dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, mahasiswa telah memainkan peran historis sebagai aktor perubahan sosial-politik, khususnya dalam mengawal kebijakan publik yang dianggap tidak adil. Aksi demonstrasi selama era Reformasi 1998 menjadi bukti konkret bagaimana mahasiswa memosisikan diri sebagai penjaga kepentingan rakyat. Namun, perkembangan teknologi informasi dan transformasi komunikasi publik menyebabkan perubahan cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Ruang digital seperti media sosial, petisi daring, dan diskusi komunitas kini semakin populer sebagai sarana advokasi, terutama di kalangan generasi muda. Di tengah perubahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas demonstrasi fisik di era digital, khususnya dari sudut pandang mahasiswa yang telah mendapatkan pendidikan kebijakan publik dan administrasi negara.

Berdasarkan survei terhadap 75 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar, hanya 33,34% responden pernah terlibat dalam demonstrasi, sedangkan 66,66% tidak pernah, dengan alasan dominan seperti kekhawatiran terhadap risiko konflik, kurangnya informasi, dan ketidakpercayaan terhadap hasilnya. Menariknya, meskipun tidak berpartisipasi langsung, mayoritas mahasiswa menunjukkan sikap kritis dengan mengusulkan partisipasi alternatif seperti kampanye media sosial, petisi daring, dan audiensi. Temuan ini sejalan dengan literatur lima tahun terakhir, seperti Sari dan Nugroho (2018) serta Nurhadi dan Salim (2021) yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang advokasi baru yang aman dan efektif. Wulandari et al. (2021) mencatat bahwa efektivitas demonstrasi sangat bergantung pada konteks sosial dan persepsi masyarakat. Penelitian lain oleh Arbinata dan Warsono (2021) memperkuat bahwa persepsi mahasiswa terbentuk dari konstruksi sosial melalui pengalaman organisasi dan pendidikan. Selain itu, studi oleh Fithriyatirrizqoh dan Zhanaty (2024) menunjukkan bahwa demonstrasi masih memiliki nilai simbolik dan strategis dalam proses demokrasi, meskipun mulai bersaing dengan strategi advokasi digital yang lebih cepat dan inklusif.

Namun demikian, sebagian besar studi yang ada berfokus pada perubahan pola partisipasi secara umum tanpa melihat secara spesifik bagaimana mahasiswa dengan latar belakang ilmu administrasi menilai efektivitas demonstrasi dan strategi partisipasi lainnya. Padahal, mahasiswa dalam bidang ini memiliki pemahaman teoritis tentang tata kelola pemerintahan dan mekanisme kebijakan publik, sehingga perspektif mereka sangat penting untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi bisa lebih strategis dan berdampak. Inilah yang menjadi gap dalam kajian akademik sebelumnya. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menyajikan analisis dari sudut pandang mahasiswa administrasi publik secara empiris dan kontekstual di era demokrasi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana mahasiswa memaknai demonstrasi dalam kerangka demokrasi partisipatif, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan mereka, serta merumuskan bentuk partisipasi publik alternatif yang dinilai lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik partisipatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Demonstrasi mahasiswa telah lama dipahami sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral yang sah dan strategis dalam sistem demokrasi. Alamsyah dan Prasetyo (2020) menekankan bahwa efektivitas demonstrasi dalam memengaruhi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh legitimasi isu, konsistensi gerakan, serta strategi komunikasi yang digunakan. Dalam konteks mahasiswa, demonstrasi bukan hanya ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak pada keadilan sosial. Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam cara masyarakat, termasuk mahasiswa, menyampaikan aspirasi mereka.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka ruang baru dalam partisipasi publik. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2018) menunjukkan bahwa kampanye media sosial telah menjadi strategi advokasi digital yang efektif, mampu menjangkau audiens luas, dan mendorong partisipasi masyarakat tanpa harus turun ke jalan. Nurhadi dan Salim (2021) juga mengidentifikasi media sosial sebagai ruang baru advokasi publik yang memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi secara cepat, aman, dan interaktif. Peralihan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari aksi fisik ke digital movement yang tidak kalah kuat dalam memengaruhi opini publik maupun pengambil kebijakan.

Selain itu, studi oleh Wulandari, Hartati, dan Susanto (2021) menyebutkan bahwa respon publik terhadap demonstrasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan pengalaman pribadi. Masyarakat yang pernah mengalami dampak negatif demonstrasi, seperti kemacetan atau kekerasan, cenderung bersikap apatis atau bahkan menolak aksi serupa. Oleh karena itu, pendekatan partisipasi yang lebih damai, terstruktur, dan berbasis data menjadi semakin relevan, terutama bagi kalangan muda seperti mahasiswa.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji efektivitas demonstrasi dan partisipasi politik, namun belum banyak yang menggabungkan perspektif mahasiswa dalam konteks perubahan strategi advokasi di era digital. Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk hilirisasi dari temuan-temuan teoritis dan empiris tersebut, dengan memfokuskan pada mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai populasi strategis yang memahami konsep-konsep tata kelola publik dan advokasi kebijakan. Melalui pendekatan survei kuantitatif, kegiatan ini berupaya mengidentifikasi pemahaman, sikap, dan preferensi mahasiswa terhadap demonstrasi serta alternatif bentuk partisipasi publik lainnya.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei daring sebagai instrumen utama. Tujuannya adalah menggali pemahaman mahasiswa terhadap makna aksi demonstrasi dalam kerangka demokrasi partisipatif, serta mengenali bentuk partisipasi publik lain yang dianggap lebih tepat dan efisien. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjangkau responden secara luas dan menyediakan data yang dapat dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh yang representatif.

Langkah pertama dari kegiatan ini adalah menyusun kuesioner yang mencakup tiga tipe pertanyaan, yaitu: (1) pertanyaan pilihan ganda untuk mengetahui pengalaman langsung responden terkait demonstrasi; (2) pertanyaan skala Likert 1–5 untuk mengukur pandangan dan tingkat persetujuan terhadap topik demonstrasi, partisipasi masyarakat, serta penggunaan media sosial; dan (3) pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan responden mengenai cara-cara penyampaian aspirasi yang dianggap paling efektif. Kuesioner tersebut disebarluaskan melalui platform digital, terutama lewat grup WhatsApp mahasiswa Ilmu Administrasi Negara

Universitas Tidar. Total terdapat 75 responden yang mengisi kuesioner.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi, persentase, dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan jawaban dari pertanyaan terbuka diproses secara kualitatif dengan mengelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti bentuk partisipasi alternatif, hambatan demonstrasi, dan pandangan terhadap advokasi digital.

Keberhasilan kegiatan ini dievaluasi melalui tiga indikator. Pertama, perubahan sikap responden, yang terlihat dari tanggapan terhadap demonstrasi dan bentuk partisipasi lainnya. Kedua, dari sisi kesadaran sosial, dilihat dari sejauh mana mahasiswa menyadari peran mereka sebagai agen perubahan melalui partisipasi alternatif seperti petisi daring, diskusi publik, dan kampanye media digital. Ketiga, meskipun tidak menargetkan dampak ekonomi secara langsung, kegiatan ini dinilai meningkatkan kapasitas intelektual dan kepedulian sosial mahasiswa yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berperan sebagai media edukasi dan transformasi bagi mahasiswa sebagai generasi muda di era demokrasi digital.

JENIS DATA

Penelitian ini mengambil 2 jenis data sekaligus, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner daring, berupa data kuantitatif (skala Likert dan frekuensi) dan data kualitatif melalui jawaban terbuka. Sedangkan data sekunder diambil melalui studi pustaka dari jurnal ilmiah terkait demonstrasi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan melalui platform daring, khususnya melalui grup WhatsApp mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Total responden yang berhasil mengisi kuesioner sebanyak 75 orang.

ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap, pandangan, dan preferensi mahasiswa terhadap efektivitas aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik. Data diperoleh melalui kuesioner daring yang terdiri atas tiga jenis pertanyaan, yakni pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan berskala Likert (skala 1-5), serta pertanyaan terbuka. Instrumen disebarakan kepada 75 mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Untuk menganalisis data kuantitatif, digunakan alat bantu statistik berupa perangkat lunak IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Penggunaan SPSS memungkinkan peneliti mengolah data dengan akurat dan sistematis. Analisis statistik yang dilakukan meliputi:

1. Distribusi frekuensi dan persentase untuk menjelaskan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban terhadap setiap item.
2. Perhitungan nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standard deviation) untuk menilai seberapa besar penyebaran data dan tingkat kesepakatan responden terhadap pernyataan-pernyataan tertentu.
3. Uji validitas dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan berskala Likert dengan teknik korelasi Pearson Product Moment untuk memastikan bahwa setiap item mampu mengukur variabel yang dimaksud secara akurat.

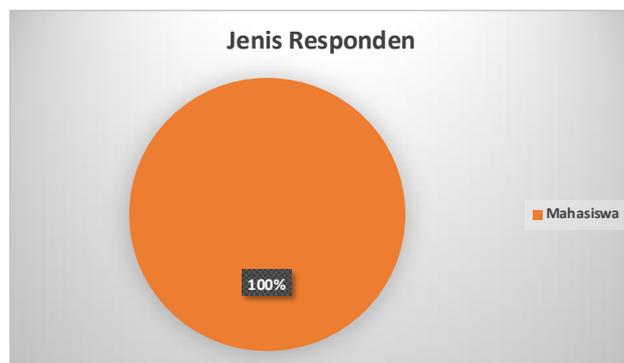
Sementara itu, data dari pertanyaan terbuka dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan jawaban responden ke dalam tema-tema seperti efektivitas demonstrasi, media sosial sebagai alat mobilisasi, serta bentuk partisipasi alternatif yang dianggap lebih aman dan strategis. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menangkap

makna dan pandangan subjektif mahasiswa yang tidak dapat direpresentasikan secara kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

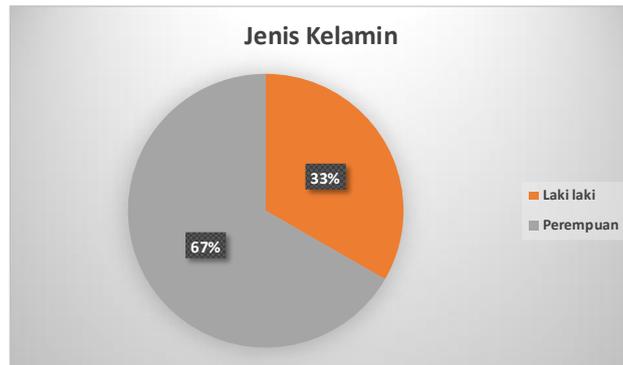
Penelitian ini menyajikan hasil dari survei yang telah dilakukan terhadap 75 mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar mengenai efektivitas aksi demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi dalam konteks demokrasi partisipatif. Data yang diperoleh mencerminkan pandangan, pengalaman, dan sikap mahasiswa terhadap aksi demonstrasi, baik sebagai bentuk partisipasi politik tradisional maupun dalam kaitannya dengan perkembangan media sosial dan strategi advokasi modern. Analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif deskriptif yang menghasilkan data dalam bentuk frekuensi, persentase, dan skor statistik dari skala Likert. Selain itu, analisis kualitatif terhadap pertanyaan terbuka juga dilakukan untuk menggali lebih dalam persepsi mahasiswa mengenai alternatif partisipasi publik yang dianggap lebih efektif dan konstruktif. Hasil temuan kemudian dibahas secara komprehensif dengan mengacu pada kerangka teori partisipasi politik, demokrasi deliberatif, dan dinamika advokasi digital.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat teridentifikasi pola pemikiran mahasiswa dalam menilai efektivitas demonstrasi serta preferensi mereka terhadap strategi penyampaian aspirasi yang dinilai lebih relevan, aman, dan berdampak dalam situasi sosial-politik saat ini.



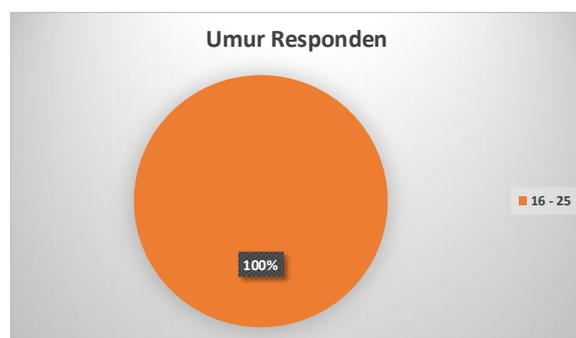
Bagan 1

Seluruh partisipan dalam survei ini berasal dari kalangan mahasiswa, yang ditunjukkan dengan angka 100% pada kategori "Mahasiswa". Hal ini menegaskan bahwa survei memang ditujukan secara spesifik kepada kelompok akademik yang berada di perguruan tinggi. Fokus pada mahasiswa penting karena mereka sering kali dianggap sebagai agen perubahan sosial yang aktif dan kritis terhadap kondisi sosial-politik di sekitarnya. Dengan demikian, hasil survei ini mencerminkan opini kelompok yang secara historis dikenal sebagai penggerak utama dalam berbagai dinamika sosial, termasuk aksi demonstrasi.



Bagan 2

Kemudian untuk distribusi jenis kelamin responden menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, yakni sebesar 67%, sementara laki-laki hanya 33%. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa keterlibatan perempuan dalam memberikan pandangan terhadap isu sosial seperti demonstrasi cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan partisipasi perempuan dalam wacana publik, termasuk dalam konteks kebebasan berekspresi dan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi. Perbedaan proporsi ini juga dapat menjadi bahan refleksi mengenai representasi dan keberimbangan gender dalam berbagai gerakan sosial mahasiswa.



Bagan 3

Semua responden berada dalam kelompok usia 16 hingga 25 tahun, yang merupakan rentang usia produktif dan sering disebut sebagai usia emas dalam pembentukan identitas sosial dan politik. Kelompok usia ini juga dikenal sebagai kelompok yang paling terhubung dengan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga opini mereka sangat dipengaruhi oleh paparan digital dan media sosial. Fakta bahwa seluruh responden berada di rentang usia ini menguatkan relevansi survei terhadap dinamika mahasiswa saat ini, yang tidak hanya aktif di dunia akademik tetapi juga dalam diskursus sosial-politik.

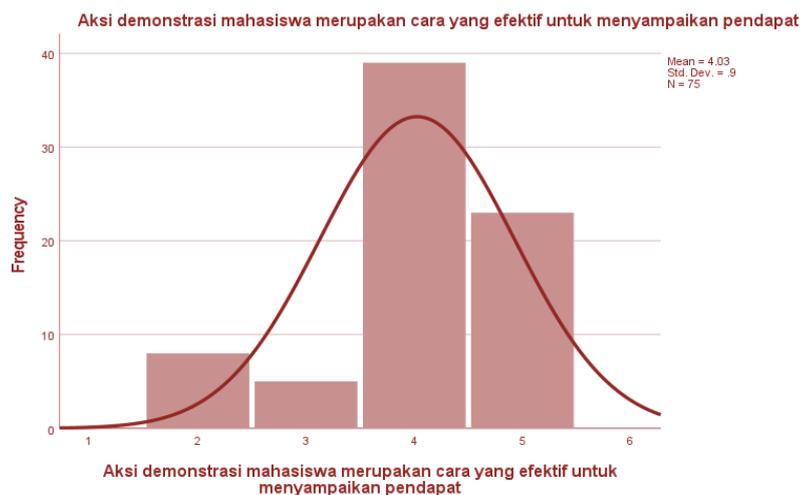


Bagan 4

Namun dari jumlah 75 responden, sebanyak 76% responden mengaku belum pernah mengikuti aksi demonstrasi, sedangkan 24% lainnya menyatakan pernah terlibat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa sering diasosiasikan dengan aksi demonstrasi, pada kenyataannya hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memiliki pengalaman langsung. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi, rasa takut terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan, atau ketidaksetujuan terhadap cara penyampaian aspirasi tersebut. Namun demikian, angka 24% yang pernah ikut menunjukkan bahwa masih ada kelompok mahasiswa yang tetap aktif secara fisik dalam menyuarakan pendapatnya di ruang publik.

Tabel 1. Distribusi frekuensi persepsi mahasiswa terhadap efektivitas aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	10.7	10.7	10.7
	Tidak Ada Pendapat	5	6.7	6.7	17.3
	Setuju	39	52.0	52.0	69.3
	Sangat Setuju	23	30.7	30.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Menurut visualisasi data berupa diagram batang dan tabel frekuensi diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memandang aksi demonstrasi sebagai sarana yang efektif dalam menyampaikan pendapat. Sebanyak 52% responden menyatakan setuju dan 30,7% sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, sehingga total 82,7% menunjukkan sikap positif. Hanya sebagian kecil yang tidak setuju (10,7%) atau tidak memiliki pendapat (6,7%). Temuan ini mengindikasikan bahwa demonstrasi masih dianggap sebagai bentuk ekspresi politik yang relevan di kalangan mahasiswa. Data ini memperkuat pandangan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi dalam ruang publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian kualitatif (Arbinata & Warsono, 2021) yang mengungkapkan bahwa konstruksi mahasiswa terhadap demonstrasi terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam fase eksternalisasi, pengetahuan mahasiswa tentang demonstrasi dibentuk oleh pengalaman sosial melalui pendidikan, lingkungan keluarga, serta organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, dalam proses objektivasi, demonstrasi dipahami sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang sah dan edukatif, bahkan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan metode lain seperti audiensi atau petisi. Akhirnya, proses internalisasi menunjukkan bahwa mahasiswa menjadikan demonstrasi sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab sosial mereka sebagai agen perubahan. Dengan demikian, baik data kuantitatif maupun temuan kualitatif menunjukkan konsistensi persepsi mahasiswa bahwa demonstrasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan menyuarakan keresahan publik (Arbinata & Warsono, 2021).

Tabel 2. Distribusi frekuensi pandangan mahasiswa terhadap potensi kekerasan dan konflik dalam aksi demonstrasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	19	25.3	25.3	25.3
	Tidak Ada Pendapat	10	13.3	13.3	38.7
	Setuju	35	46.7	46.7	85.3
	Sangat Setuju	11	14.7	14.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan hasil survei terhadap 75 responden mengenai pernyataan “Aksi demonstrasi sering kali berujung pada kekerasan dan konflik”, mayoritas responden menunjukkan kecenderungan untuk menyetujui pernyataan tersebut. Sebanyak 46,7% responden menyatakan setuju, dan 14,7% menyatakan sangat setuju, sehingga total 61,4% responden mendukung pandangan bahwa demonstrasi berpotensi menimbulkan kekerasan. Di sisi lain terdapat 25,3% responden menyatakan tidak setuju dan 13,3% tidak memberikan pendapat. Rata-rata jawaban berada pada angka 3,51 dari skala 5 dengan standar deviasi 1,032 yang mengindikasikan sebaran data yang relatif moderat namun condong pada persetujuan.

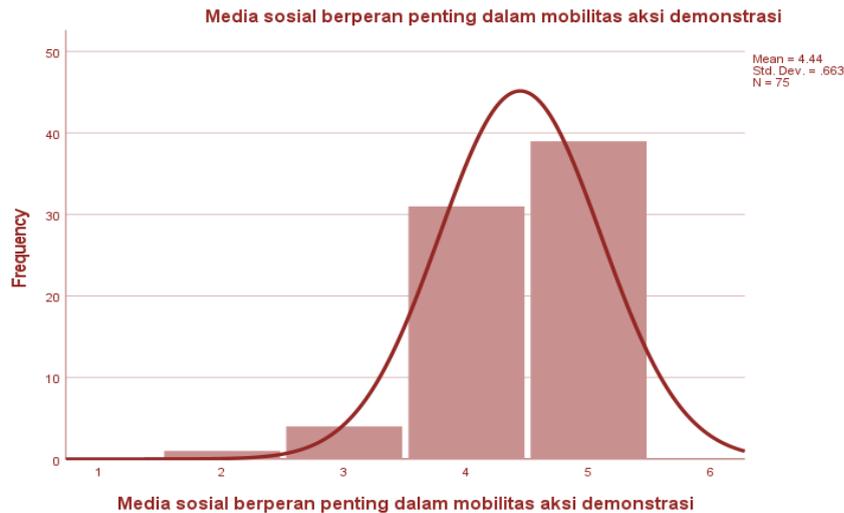
Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden menilai demonstrasi bukan hanya sebagai bentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai kegiatan yang rawan konflik. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh maraknya pemberitaan media terkait demonstrasi yang diwarnai kekerasan atau keributan. Seperti yang dikemukakan oleh Rahmawati dan Hidayat (2022), citra negatif terhadap demonstrasi kerap kali terbentuk karena ekspos media yang lebih menyoroti aspek kerusakan dibandingkan substansi tuntutan massa. Selain itu, menurut Putra dan Ningsih (2021), kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan batasan dalam berdemonstrasi dapat memicu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi publik dan pendekatan dialogis dari aparat serta pemangku kebijakan agar demonstrasi dapat berjalan damai dan produktif. Demonstrasi seharusnya menjadi sarana demokratis yang sehat, bukan dipersepsikan sebagai ancaman keamanan semata.

Sebagai penguat, sebagian mahasiswa juga menilai bahwa demonstrasi memang bisa mengganggu aktivitas masyarakat, meskipun bukan sebagai hambatan utama dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Mereka menyadari bahwa aksi di ruang publik dapat berdampak pada kelancaran aktivitas harian warga, namun pada saat yang sama, aksi tersebut dinilai tetap memiliki nilai perjuangan yang sah dalam demokrasi. Ini menandakan adanya keseimbangan pandangan: mahasiswa mengakui potensi gangguan, tetapi tetap memandang demonstrasi sebagai sarana penting untuk menyampaikan aspirasi.

Gabungan pemahaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya melihat demonstrasi sebagai aksi fisik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi komunikasi publik. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menyusun gerakan yang terorganisir, mengedepankan pendekatan damai, serta mampu menyampaikan pesan dengan cara yang inklusif dan tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, demonstrasi tidak hanya menjadi simbol perlawanan, melainkan juga menjadi alat edukasi dan pemersatu dalam membangun dialog antara rakyat dan pemerintah.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Tentang Peran Media Sosial Dalam Mengajak Partisipasi Aksi Demonstrasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Tidak Ada Pendapat	4	5.3	5.3	6.7
	Setuju	31	41.3	41.3	48.0
	Sangat Setuju	39	52.0	52.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa 52% responden menjawab “Sangat Setuju” dan 41,3% responden lain menjawab “Setuju”. Hal ini meyakinkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam mengajak partisipasi publik untuk mengikuti aksi demonstrasi. Dengan nilai rata-rata sebesar 4,4 dari skala 5 dan simpangan baku sebesar 0,663, dapat disimpulkan bahwa ada persepsi kuat mengenai efektivitas media sosial sebagai medium mobilisasi gerakan massa. Temuan ini selaras dengan kesimpulan penelitian Tiara Apriyani (2021), yang menegaskan bahwa media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen penggerak demokrasi baru di era digital. Melalui fitur seperti hashtag, retweet, dan story, media sosial mampu membentuk opini publik dan memicu aksi kolektif secara langsung di ruang fisik.

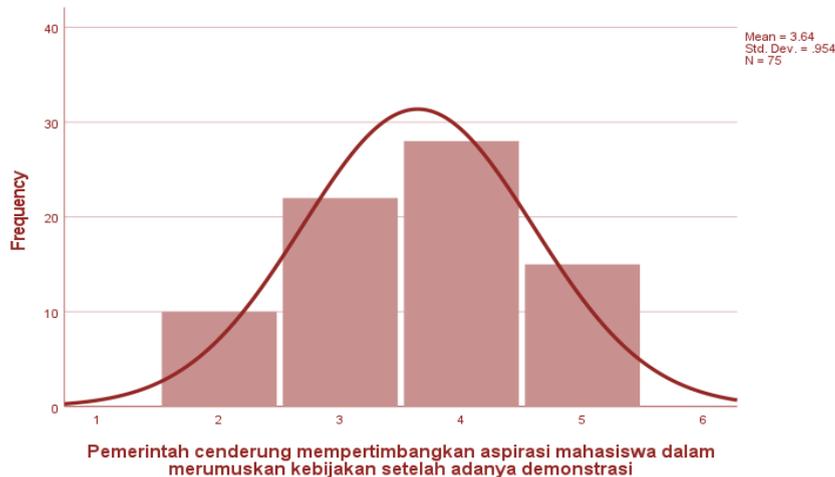
Lebih lanjut, kesimpulan dalam jurnal Andika Nur Perkasa (2022) memperkuat interpretasi data ini dengan menunjukkan bahwa ajakan demonstrasi yang disebarluaskan melalui media sosial—dalam bentuk poster digital, panduan aksi, dan narasi yang kuat—memiliki dampak nyata terhadap keputusan individu untuk terlibat dalam aksi protes. Bahkan, individu tanpa latar belakang aktivisme pun terdorong untuk ikut turun ke jalan karena merasa terhubung dengan isu-isu yang berkembang melalui jejaring digital. Perkasa menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai katalisator gerakan sosial, di mana penyebaran informasi yang cepat dan emosional mendorong mobilisasi massa secara spontan dan masif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data empiris dalam grafik yang ditampilkan tidak hanya mendukung klaim peran strategis media sosial dalam mengajak massa aksi, tetapi juga mengkonfirmasi kesimpulan dari kedua jurnal tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi arena demokrasi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan ekspresi politiknya secara langsung, terkoordinasi, dan luas. Integrasi antara kekuatan naratif dan keterjangkauan teknologis menjadikan media sosial sebagai jembatan yang efektif antara ruang daring dan gerakan nyata di lapangan.

Tabel 4. Distribusi frekuensi penilaian mahasiswa terhadap pertimbangan pemerintah terhadap aspirasi demonstrasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	10	13.3	13.3	13.3
	Tidak Ada Pendapat	22	29.3	29.3	42.7
	Setuju	28	37.3	37.3	80.0
	Sangat Setuju	15	20.0	20.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Pemerintah cenderung mempertimbangkan aspirasi mahasiswa dalam merumuskan kebijakan setelah adanya demonstrasi



Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan data visual pada grafik dan tabel yang menunjukkan persepsi mahasiswa mengenai sejauh mana pemerintah mempertimbangkan aspirasi mereka dalam merumuskan kebijakan setelah demonstrasi, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden setuju (37,3%) dan sangat setuju (20%) bahwa aspirasi mahasiswa dipertimbangkan. Ini menunjukkan bahwa total 57,3% responden memiliki keyakinan positif terhadap pengaruh demonstrasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan kajian Fithriyatirrizqoh dan Zhanaty (2024), yang menekankan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah wujud nyata dari emansipasi masyarakat dalam hukum, dan merupakan instrumen untuk menyuarakan aspirasi sosial secara langsung kepada pemerintah.

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 42,7% mahasiswa yang tidak yakin (29,3%) atau bahkan tidak setuju (13,3%) bahwa aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan. Hal ini mengindikasikan adanya keraguan terhadap efektivitas demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi. Dalam konteks ini, jurnal dari Fatmala dan Nurgiansah (2023) menegaskan bahwa tidak semua mahasiswa memahami peran dan tujuan demonstrasi secara mendalam, dan bahwa partisipasi politik mahasiswa sering kali terkendala oleh minimnya pengetahuan politik serta adanya persepsi bahwa pemerintah lebih memikirkan kepentingan sendiri daripada rakyat.

Dengan demikian, grafik tersebut menjadi bukti empiris bahwa walaupun demonstrasi mahasiswa masih dianggap sebagai alat penting dalam memperjuangkan perubahan kebijakan, efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana mahasiswa memahami perannya sebagai

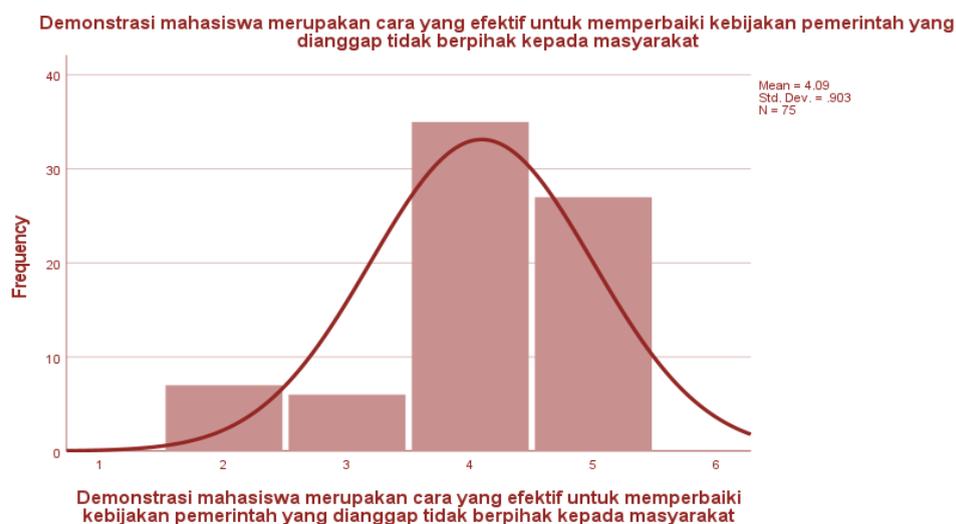
agent of change dan pada tingkat keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik. Ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pendidikan politik di kalangan mahasiswa agar gerakan yang dilakukan bersifat substantif, terorganisir, dan berdampak terhadap pengambilan kebijakan publik.

Sebagai penguat, mahasiswa juga menganggap bahwa aksi demonstrasi memiliki kontribusi dalam mendorong pemerintah agar lebih cepat mengambil keputusan. Hal ini memperkuat gagasan bahwa demonstrasi berfungsi bukan hanya sebagai bentuk tekanan sosial, tetapi juga sebagai pemicu respons kebijakan yang lebih cepat. Selain itu, mahasiswa juga melihat bahwa setelah berlangsungnya aksi demonstrasi, pemerintah menunjukkan sikap yang lebih responsif. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap demonstrasi sebagai bentuk advokasi publik yang nyata.

Gabungan dari ketiga pandangan ini mencerminkan bahwa mahasiswa menilai demonstrasi bukan hanya dari sisi emosional atau simbolik, melainkan sebagai instrumen strategis yang masih relevan digunakan dalam sistem demokrasi. Namun demikian, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada sejauh mana mahasiswa mampu menyusun gerakan yang substantif, inklusif, serta mampu membangun dialog dengan pemerintah dan masyarakat luas.

Tabel 5. Distribusi frekuensi persepsi mahasiswa terhadap demonstrasi sebagai sarana perbaikan kebijakan publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	9.3	9.3	9.3
	Tidak Ada Pendapat	6	8.0	8.0	17.3
	Setuju	35	46.7	46.7	64.0
	Sangat Setuju	27	36.0	36.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Mahasiswa menilai demonstrasi sebagai alat advokasi yang masih memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan kebijakan publik. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan bahwa demonstrasi merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Sebanyak 46,7% responden menyatakan setuju, dan 36,0% lainnya sangat setuju, menunjukkan bahwa 82,7% mahasiswa meyakini efektivitas demonstrasi sebagai instrumen untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju (9,3%) atau tidak memberikan pendapat (8,0%).

Pandangan ini sejalan dengan gagasan Fithriyatirrizqoh dan Zhanaty (2024) yang menyebutkan bahwa demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk emansipasi masyarakat terhadap hukum dan menjadi saluran strategis dalam menyuarakan aspirasi sosial secara langsung kepada pemerintah. Dalam konteks ini, mahasiswa diposisikan sebagai kelompok intelektual muda yang memiliki kapasitas untuk mengawal kebijakan melalui tekanan publik yang sah. Dukungan terhadap efektivitas demonstrasi juga diperkuat oleh pandangan mahasiswa bahwa aksi besar-besaran dapat mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Meskipun tidak disebutkan angka persentasenya, data tersebut menggambarkan kecenderungan persepsi positif yang konsisten di kalangan responden. Mereka menilai bahwa kekuatan kolektif dalam demonstrasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga dapat menciptakan tekanan nyata yang mendorong respons kebijakan lebih cepat.

Temuan ini dikuatkan oleh Jiwandono (2020) yang menyebutkan bahwa mahasiswa berperan sebagai aktor penting dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia melalui kontrol terhadap jalannya kebijakan publik. Hal serupa disampaikan oleh Maghribi et al. (2025), yang menegaskan bahwa aksi mahasiswa memiliki kekuatan simbolik dan sosial, terutama bila dilakukan secara kolektif dan masif. Bahkan, contoh konkret seperti aksi mahasiswa pada 22 Agustus 2024 di Universitas Negeri Semarang disebut berhasil membuka ruang diskusi publik terhadap RUU yang kontroversial.

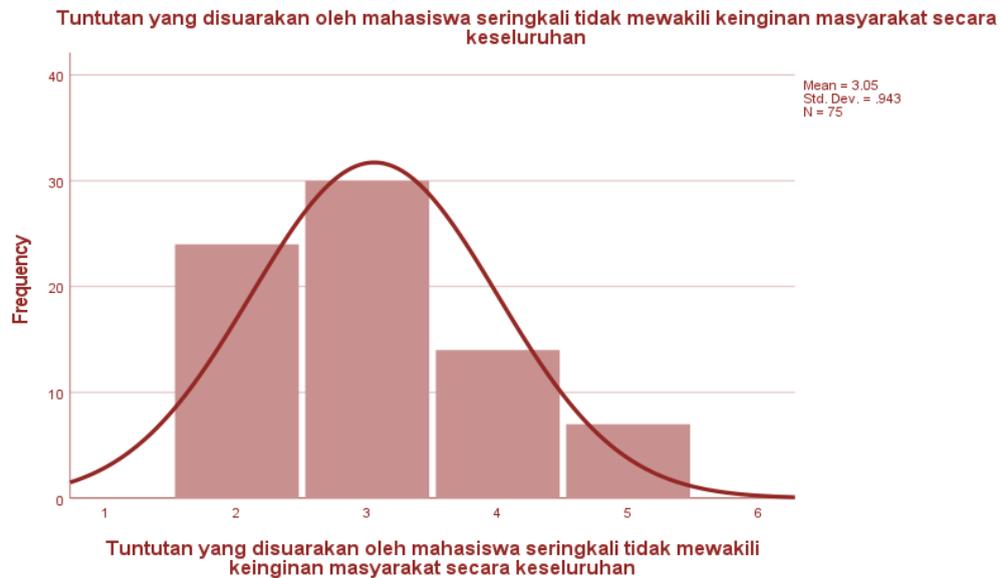
Dalam perspektif komunikasi politik, Melisa (2025) menyoroti bahwa mahasiswa kini juga memanfaatkan media sosial sebagai saluran penyebaran pesan politik. Aksi yang terorganisir secara daring maupun luring dinilai mampu menciptakan tekanan sosial bahkan sebelum kebijakan diterapkan. Namun demikian, Dewi dan Setiawan (2023) memberi catatan penting bahwa efektivitas demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta, tetapi juga oleh substansi tuntutan yang dibawa. Gerakan mahasiswa harus menghindari kecenderungan narsistik atau aksi demi eksistensi pribadi semata, agar nilai ideal demokrasi tetap terjaga dan tidak tereduksi oleh motif individual.

Dengan demikian, gabungan temuan ini tidak hanya menegaskan legitimasi demonstrasi sebagai sarana advokasi kebijakan, tetapi juga menggambarkan semangat kolektif mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial yang masih kuat dan relevan dalam kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.

Tabel 6. Distribusi frekuensi pandangan mahasiswa terhadap representasi tuntutan mahasiswa terhadap kehendak masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	24	32.0	32.0	32.0
	Tidak Ada Pendapat	30	40.0	40.0	72.0
	Setuju	14	18.7	18.7	90.7

	Sangat Setuju	7	9.3	9.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Hasil tersebut menunjukkan tanggapan terhadap pernyataan bahwa "Tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa seringkali tidak mewakili keinginan masyarakat secara keseluruhan." Dari 75 responden yang terlibat, 40% berada pada posisi netral sementara 32% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebaliknya, kelompok yang setuju dan sangat setuju masing-masing hanya sebesar 18,7% dan 9,3%. Dengan rata-rata skor yang mencapai 3,05 dari 5, maka persepsi responden terhadap representasi tuntutan mahasiswa cenderung moderat, meskipun terdapat kecenderungan kuat pada posisi netral atau tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa dianggap memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan publik, masih terdapat persepsi bahwa tuntutan mereka belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat.

Menurut Arifin dan Zaini (2020), mahasiswa sering kali menjadi katalisator perubahan sosial melalui tuntutan yang mereka ajukan. Namun, keterbatasan dalam memahami kompleksitas masyarakat dapat menyebabkan tuntutan mereka tidak selalu mencerminkan kebutuhan publik secara keseluruhan. Harahap (2021) juga menegaskan bahwa representasi yang efektif memerlukan pendekatan yang inklusif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses advokasi. Sebaliknya, Rachmat (2022) mencatat bahwa gerakan mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan idealis mereka dan kebutuhan pragmatis masyarakat.

Lebih lanjut, Suryani (2023) menjelaskan bahwa komunikasi politik mahasiswa memainkan peran penting dalam memastikan tuntutan yang mereka ajukan dapat diterima oleh masyarakat luas. Namun, jika komunikasi ini tidak dilakukan dengan strategi yang tepat, maka relevansi tuntutan tersebut dapat dipertanyakan. Wicaksono (2024) menambahkan bahwa transformasi sosial melalui gerakan mahasiswa hanya dapat terjadi jika mereka mampu menjembatani aspirasi berbagai lapisan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, temuan ini menjadi refleksi penting bagi gerakan mahasiswa untuk mengevaluasi strategi mereka dalam merumuskan dan menyuarakan tuntutan. Upaya

untuk mendekati aspirasi masyarakat secara lebih menyeluruh perlu dilakukan agar peran mereka dalam advokasi menjadi lebih inklusif, relevan, dan efektif dalam mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Sebagai pelengkap dari temuan kuantitatif sebelumnya, hasil analisis terhadap pertanyaan terbuka dalam survei ini menunjukkan adanya keragaman pandangan mahasiswa mengenai alternatif penyampaian aspirasi yang lebih efektif dibandingkan aksi demonstrasi. Meskipun sebagian responden menjawab tidak mengetahui atau merasa tidak ada cara lain yang lebih baik, sebagian besar lainnya menyarankan berbagai bentuk partisipasi publik yang lebih modern, aman, dan strategis. Bentuk alternatif yang paling banyak disebut adalah penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dan penyebaran isu. Sebanyak 19 responden menyebut kata 'media' dan 16 menyebut 'sosial', menandakan tingginya kesadaran akan kekuatan platform digital seperti Instagram, Twitter/X, dan TikTok dalam membentuk opini publik. Media sosial dianggap mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat, serta memberikan ruang interaksi yang fleksibel tanpa risiko fisik sebagaimana demonstrasi di lapangan.

Selain itu, terdapat 10 responden yang mengusulkan penggunaan petisi daring sebagai bentuk advokasi yang efisien. Petisi dinilai lebih formal dan terukur, serta dapat menjadi dasar untuk melakukan

negosiasi atau audiensi dengan pihak berwenang. Beberapa responden juga menyarankan metode penyampaian langsung melalui perwakilan mahasiswa, kampanye edukatif dalam bentuk poster atau infografis, serta audiensi resmi dengan lembaga pemerintahan sebagai solusi yang konstruktif dan minim konflik. Pendekatan-pendekatan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa mulai memandang partisipasi publik tidak hanya dari sisi aksi fisik, tetapi juga dari sisi strategis, komunikatif, dan berbasis data. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya advokasi digital dan dialog formal dalam era demokrasi modern. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa generasi muda tidak anti-demonstrasi, tetapi mulai selektif dan inovatif dalam memilih metode perjuangan yang sesuai dengan konteks zaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hanya sebagian kecil mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar yang pernah terlibat langsung dalam demonstrasi, mayoritas memandang aksi tersebut sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral yang sah dan berpotensi mendorong perubahan kebijakan publik. Mereka mengakui peran historis demonstrasi dalam dinamika sosial-politik Indonesia, terutama sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap kebijakan

pemerintah yang dianggap tidak adil. Namun, beberapa mahasiswa juga menyoroti sisi negatifnya, seperti risiko konflik, kekerasan, gangguan ketertiban, dan ketidakjelasan tuntutan, sehingga muncul preferensi terhadap bentuk partisipasi lain yang lebih relevan di era digital.

Penelitian ini merekomendasikan agar mahasiswa tidak terpaku pada demonstrasi sebagai satu-satunya cara menyampaikan aspirasi. Mereka perlu mengeksplorasi alternatif partisipasi publik yang lebih strategis, damai, dan sesuai perkembangan zaman, seperti kampanye melalui media sosial, petisi daring, forum diskusi, dan audiensi formal. Selain itu, mahasiswa perlu meningkatkan literasi kebijakan publik dan kemampuan advokasi agar dapat menyusun strategi yang efektif dan berdampak. Penting pula untuk menjalin komunikasi erat dengan masyarakat agar aspirasi yang disampaikan benar-benar mewakili kebutuhan publik. Dengan pendekatan yang lebih konstruktif, mahasiswa dapat tetap berperan sebagai agen perubahan tanpa harus bergantung pada demonstrasi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar mahasiswa tidak hanya mengandalkan demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga mulai mengoptimalkan bentuk partisipasi alternatif yang lebih strategis seperti kampanye media sosial, petisi daring, diskusi publik, dan audiensi formal dengan lembaga terkait. Institusi pendidikan tinggi diharapkan memberikan penguatan dalam bentuk pendidikan advokasi, pelatihan literasi kebijakan, serta simulasi komunikasi publik agar mahasiswa memiliki kompetensi praktis dalam memperjuangkan isu-isu masyarakat secara konstruktif. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih partisipatif dan responsif terhadap masukan mahasiswa guna meningkatkan legitimasi kebijakan publik. Aparat keamanan juga diharapkan mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal demonstrasi agar tetap damai dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan. Sementara itu, media massa perlu menyajikan pemberitaan yang berimbang dan berorientasi pada substansi tuntutan, guna membentuk opini publik yang adil dan mendorong iklim demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, N. M. T. O., Suarjaya, I. M. A. D., & Githa, D. P. (2023). Analisis Sentimen Publik Terhadap Aksi Demonstrasi di Indonesia Menggunakan Support Vector Machine Dan Random Forest. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(2), 257-267.
- Alamsyah, T., & Prasetyo, H. (2020). Efektivitas Demonstrasi Mahasiswa dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(2), 123-135.
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17-30.
- Arbinata, M., & Warsono, H. (2021). Demonstrasi Mahasiswa sebagai Konstruksi Sosial: Perspektif Berger & Luckmann. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 55-70.
- Arifin, Z., & Zaini, R. (2020). Partisipasi Mahasiswa dalam Gerakan Sosial di Indonesia. Jakarta: Pustaka Akademika.
- Billyantari, W. P., Erawan, K. P., & Pramana, G. I. (2020). SATIRE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PROTES AKSI DEMONSTRASI# TOLAKOMNIBUSLAWCIPTAKERJA ((Studi Kasus: Aksi Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Bali Pada Oktober 2020). Universitas Udayana, Bali.
- Dewi, N. P. S., & Setiawan, I. G. A. (2023). Pengaruh Aktivistis Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial Politik Di Era Digital 5.0. *ResearchGate*
- Fatmala, A. P., & Nurgiansah, T. H. (2023). Kekuatan Politik Mahasiswa sebagai Agen of Change terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Sistem Politik. *Jurnal PPKn*, 11(1), 74-81.
- Fithriyatirrizqoh, N., & Zhanaty, A. (2024). Demonstrasi Mahasiswa dan Emansipasi Hukum dalam Perspektif Sosial Engineering. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), *99-112.
- Hanuzral, M., Fatmariza, F., Indrawadi, J., & Dewi, S. F. (2023). PARTISIPASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI POLITIK MELALUI AKSI DEMONSTRASI. *Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP*, 3(2), 108-113.
- Haryanto, B. (2018). Komunikasi Partisipatoris dalam Gerakan Sosial Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 55-68.
- Jiwandono, I. S. (2020). Dinamika Sosial Sikap Narcisctic Aksi Demonstrasi Mahasiswa ADalam Prospek Demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. VIII No. 1.
- Jiwandono, I. S., & Oktavianti, I. (2020). Analisis aksi demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara sikap kritis dan narsis. *Jurnal Asketik*, 4(1), 154-162.
- Maghribi, S. S., et al. (2025). Analisis Peran Mahasiswa dalam Mengawal Konstitusi melalui Aksi Demonstrasi. *Jurnal Mediasi*, Vol. 4(1).
- Melisa, R. S. (2025). Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025. *Jurnal Heritage*, Vol. 13(1).
- Nugraha, P., & Ardianno, S. (2021). Persepsi risiko dalam demonstrasi: Studi kuantitatif. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(1), 1-15.
- Nugroho, B., & Sari, R. (2020). Media Sosial dan Partisipasi Politik Digital. *Komunika*, 13(1), 73-88.

- Nurhadi, E., & Salim, D. (2021). Media Sosial sebagai Ruang Advokasi Publik di Era Digital. *Komunika*, 15(2), 212-227.
- Perkasa, A. N. (2022). Peran Sosial Media dalam Mobilisasi Aksi Protes Reformasi Dikorupsi. *Judul Kusa Lawa*, 4(2), 97-111.
- Sari, R., & Nugroho, B. (2018). Kampanye Media Sosial dan Dinamika Advokasi Digital. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 89-101.
- Sari, S. M., Salam, M., Sariani, D., & Usmanto, H. (2021). Analisis Faktor Pendorong Mahasiswa Universitas Jambi Dalam Mengikuti Aksi Demonstrasi Omnibus Law: Indonesia. *Jurnal EduSosial*, 1(1), 103-118.
- Setyoko, J., & Satria, M. D. (2020). Gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 12-24.
- Sulaiman, A. (2024). Media digital dan gerakan sosial: Analisis logika aksi konektif. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 1913-1920.
- Wibowo, A. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Era Reformasi. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Politik*, 8(2), 134-147.
- Wulandari, S., Hartati, Y., & Susanto, A. (2021). Respon Publik terhadap Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(1), 45-60.